

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan temuan bahwa kesejahteraan sosial anak akan tercapai apabila setiap kebutuhan hak-hak dasar anak menjadi agenda pembangunan yang harus diprioritaskan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk memastikan terbentuknya kesejahteraan sosial anak adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif. Lalu dilakukannya penelitian mengenai kinerja UPKSAI dengan mengacu pada indikator kinerja oleh Dwiyanto (2002) mampu untuk memetakan permasalahan terkait pengelolaan unit layanan.

Kehadiran UPKSAI diharapkan dapat memenuhi hak anak yang bertujuan mewujudkan layanan anak yang terintegrasi berupa layanan penanganan dan pencegahan permasalahan kesejahteraan sosial dan perlindungan ditingkatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kurang optimalnya kinerja dari UPKSAI dapat terjadi akibat unit layanan bukan opsi utama Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan layanan kesejahteraan anak kepada masyarakat. Dinas sosial tetap memegang prioritas penanganan permasalahan. Sebagai dampaknya UPKSAI dari segi finansial tidak memiliki kepastian anggaran, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang yang bertujuan untuk mencegah munculnya PMKS anak. Disisi lain, kuantitas sumber daya manusia dari unit juga mengalami keterbatasan tenaga.

2. Meskipun demikian dapat ditemui pula beberapa faktor yang mendukung kinerja UPKSAI, antara lain telah memiliki sarana dan prasarana kantor sekretariat yang terbilang mumpuni untuk melakukan segala operasional unit ditempat. Kualitas sumber daya manusia telah memenuhi kebutuhan unit dalam menjalankan tugas karena skill dan kapasitas petugas telah sesuai dengan posisi masing-masing. Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mendorong kinerja unit layanan guna mendukung menciptakan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

4.2. Saran

Menindaklanjuti beberapa temuan-temua penelitian serta kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut merupakan beberapa saran yang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam implementasi UPKSAI.

1. Anggaran organisasi menurut hasil temuan lapangan yang belum memiliki kepastian anggaran tetap. Hal ini akan menghambat keberjalanan berbagai tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan rincian anggaran organisasi yang spesifik dan mencukupi untuk seluruh operasional unit layanan. Kedepannya diharapkan dapat menciptakan program kerja yang meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga, dengan tujuan mencegah meningkatnya jumlah PMKS anak promosi beserta edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Dengan melakukan rekrutmen pada posisi staff data informasi, konselor psikolog dan hukum sesuai dengan kebutuhan unit. Pada posisi staff data dan informasi diperlukan sebab akses informasi terhadap UPKSAI sulit

ditemukan bahkan pada situs resmi Dinas Sosial, sehingga diperlukan pembaruan secara berkala oleh petugas. Berdasarkan temuan keterbatasan pada konselor psikolog dan hukum yang pada awal pembentukan unit telah ada, namun pada keberjalanannya menjadi kosong imbas pengurangan pegawai yang pernah terjadi.